



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AD HOC HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 Nomor: 03 /PENG/PIM/RH.04/05/2019

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 22/WKMA.NY/05/2019, Komisi Yudisial mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mengusulkan warga negara terbaik menjadi hakim ad hoc hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
5. sehat rohani dan jasmani sesuai dengan keterangan dokter pemerintah;
6. berwibawa, bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dan berkelakuan tidak tercela;
7. berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) Hukum;
8. berpengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
9. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; dan
12. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc hubungan industrial.

Pendaftaran calon hakim ad hoc hubungan industrial dilakukan secara online melalui situs <http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id> tanggal 28 Mei s.d. 25 Juni 2019. Berkas terkait persyaratan dimasukkan dalam map berwarna kuning dan dikirim ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC REPUBLIK INDONESIA, dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB (stempel pos). Berkas persyaratan antara lain sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran calon hakim ad hoc hubungan industrial di Mahkamah Agung;
2. Surat pengusulan oleh organisasi buruh dan/atau organisasi pengusaha Indonesia;
3. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
6. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hubungan industrial paling sedikit 5 (lima) tahun dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja;
8. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat;
9. surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi;
10. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus serta anggota partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik;
11. Lembar penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
12. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
13. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc hubungan industrial;
14. Pasphoto berwarna terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah);

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
2. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
5. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui situs <http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id>.

Jakarta, 28 Mei 2019

Ketua


Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450
Telp. : 021-3905876-77, 3906178, Fax : 021-3906215